

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari dewan komisaris, dewan pengawas syariah, komite audit dan leverage terhadap pengungkapan *islamic social reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Perbankan syariah ialah bank yang dijalankan dengan berdasar pada prinsip hukum syariah Islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Perbankan syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>138</sup> Obyek yang digunakan pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang telah terdaftar dalam statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016-2019.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diakses melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) serta diperoleh dari situs resmi dari beberapa BUS yang menjadi sampel dalam penelitian. Terkait pengumpulan sampel yang dipilih dalam penelitian ini merupakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode tersebut diperoleh 41 sampel dan mengenai pengambilan sampel dapat ditunjukkan melalui tabel berikut.

**Tabel 4.1.**  
**Populasi dan Sampel Penelitian Tahun 2016-2019**

Keterangan	Jumlah
Jumlah BUS yang terdaftar pada OJK selama periode 2016-2019	54
BUS yang tidak konsisten terdaftar di OJK selama satu tahun (periode)	(6)
<i>Outlier Data</i>	(7)
<b>Jumlah Sampel Akhir Penelitian</b>	<b>41</b>

*Sumber: hasil data periset*

<sup>138</sup> Arif Nugroho, "Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Terhadap Profitabilitas dan Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah," *NCAF2*, 2020, 60.

ustrasi akhir yang diambil serta diolah dalam riset ini pada awal mulanya merupakan 12 Bank Universal Syariah( Bis) dengan periode pengamatan 4 tahun sehingga ada 48 informasi. Sehabis dicoba pemrosesan informasi saat sebelum dicoba analisis ada 7 observasi outlier. Informasi outlier dikeluarkan dari proses analisis sehingga informasi yang bisa dianalisis sebanyak 41 informasi. Berikut cerminan universal obyek riset yang digunakan dalam riset ini:

### **1. Bank Muamalat Indonesia**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selanjutnya disebut “Bank Muamalat Indonesia” atau “BMI” didirikan berdasarkan “Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A”. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia( MUI), Jalinan Cendekiawan Muslim Indonesia( ICMI) serta pengusaha muslim yang setelah itu menemukan sokongan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 ataupun 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara formal beroperasi selaku bank yang melaksanakan usahanya bersumber pada prinsip syariah awal di Indonesia. Puncuknya, pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia memperoleh izin selaku Bank Devisa sehabis setahun tadinya terdaftar selaku industri publik yang tidak listing di Bursa Dampak Indonesia( BEI).

Tiba umurnya yang ke- 20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melaksanakan rebranding pada logo Bank buat terus menjadi tingkatkan awareness terhadap image selaku Bank syariah Islami, Modern serta Handal. Bank juga terus mewujudkan bermacam pencapaian dan prestasi yang diakui baik secara nasional ataupun

internasional. Sampai dikala ini, Bank beroperasi bersama sebagian entitas anaknya dalam membagikan layanan terbaik ialah Al- Ijarah Indonesia Finance( ALIF) yang membagikan layanan pembiayaan syariah,( DPLK Muamalat) yang membagikan layanan dana pensiun lewat Dana Pensiun Lembaga Keuangan, serta Baitulmaal Muamalat yang membagikan layanan buat menyalurkan dana Zakat, Infak serta Sedekah( ZIS).

Hingga dikala ini Bank Muamalat Indonesia terus bermetamorfosa buat jadi entitas yang terus menjadi baik serta mencapai perkembangan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terencana Bank Muamalat Indonesia hendak terus melaju mewujudkan visi jadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”<sup>139</sup>

## 2. Bank Rakyat Indonesia Syariah

Pada tanggal 19 Desember 2008, “Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bergabung ke dalam PT Bank BRI Syariah. Proses spin off itu berlaku secara efektif pada tanggal 1 januari 2009”. BRIS berfokus buat membidik bermacam- macam segmen di warga. Nasabah yang sudah tercipta secara luas di seluruh penjuru Indonesia meyakinkan kalau BRIS memiliki kapabilitas sebagai bank ritel modern yang terkemuka dengan bermacam- macam layanan finansial yang cocok dengan kebutuhan nasabah dengan macam layanan finansial cocok kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah buat kehidupan yang lebih berguna.

Sejak tahun 2016 BRIS mencatatkan sejarah berarti dalam ekspedisi bisnisnya. Proses rebranding logo dicoba, supaya meningkatkan brand equity BRIS yang terus menjadi kokoh bersamaan dicapainya predikat selaku bank syariah keempat terbanyak bersumber pada jumlah peninggalan. Pada tahun 2017, BRIS jadi Bank syariah awal yang menyalurkan KUR syariah sebesar 58, 1 miliar dengan total nasabah sebanyak 2. 578 nasabah.

---

<sup>139</sup> Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2019, diakses pada tanggal 1 Juli, 2021. [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id).

Bank pula ditunjuk oleh Departemen Keuangan RI sebagai bank penerima pajak Negeri secara elektronik lewat Materi Penerimaan Negeri( MPN) generasi kedua untuk nasabah korporasi serta pula perorangan. Di tahun 2018, BRIS mengambil aksi lebih tentu lagi dengan melaksanakan initial Publik Offering pada bertepatan pada 9 Mei 2018 di Bursa bursa Indonesia..

Akhir Desember 2019 BRIS telah memiliki 57 kantor cabang, 2015 kantor cabang pembantu, 10 kantor kas, 12 Unit Mikro Syariah dan 2209 kantor layanan syariah. BRIS senantiasa menajamkan diri dalam memperkenalkan yang terbaik untuk nasabah serta segala pemangku kepentingan. BRIS pula tetap buat membenarkan terpenuhinya prinsip- prinsip syariah dan undang- undang yang sudah berlaku di Indonesia.<sup>140</sup>

### 3. **Bank Jabar Banten Syariah**

PT Bank Jabar Banten Syariah dini didirikan pada bertepatan pada 20 Mei 2000, buat bisa penuhi kebutuhan para warga dengan jasa perbankan syariah yang sudah mulai berkembang. Pada dikala berdirinya tersebut Bank BJBS masih berstatus selaku Divisi/ Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Wilayah Jawa Barat serta pula Banten Tbk. Sehabis berjalan sepanjang 10 tahun dan mendapatkan persetujuan pada Rapat Universal Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Wilayah Jawa Barat serta Banten Tbk, Divisi/ Unit Usaha Syariah itu bertransformasi jadi sesuatu Bank Universal Syariah.

Secara resmi Bank BJBS didirikan pada tanggal 15 Januari 2010 serta resmi mulai beroperasi “Pada tanggal 6 Mei 2010. Bank BJBS berkantor pusat di Jalan Braga No. 135 Bandung, Bank BJB syariah juga kini sudah memiliki 8 kantor cabang, 55 kantor cabang pembantu, 2 kantor kas, 3 mobil kas keliling, 2 *payment point* dan 82 ATM “. Jaringan kantor dan ATM yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta

---

<sup>140</sup> Laporan Tahunan BRIS 2019, diakses pada tanggal 1 Juli, 2021. [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id).

serta jaringan ATM bersama yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>141</sup>

#### 4. Bank BNI Syariah

PT Bank BNI Syariah ialah hasil pemrosesan *spin off* dari Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang sudah beroperasi semenjak 29 April 2000. Proses *spin off* didasari oleh terbitnya “UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. BNIS secara resmi beroperasi bertepatan pada tanggal 19 Juni 2010. Pertumbuhan usaha perseroan senantiasa berada pada posisi diatas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah. Pada akhir tahun 2018, jumlah aset BNIS telah mencapai Rp 41, 05 triliun dan menjadi salah satu yang terbesar di dalam industri perbankan syariah nasional. BNI Syariah juga didukung oleh sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi ISO 9001:2008”.

Dalam rangka menanggapi tren serta tantangan industri perbankan mendatang, pada tahun BNIS melaksanakan transformasi secara merata. Dengan mengangkat tema “*Leading Transformational Change*” BNIS melaksanakan transformasi pada seluruh aspek, salah satu program transformasi yang dijalankan BNI Syariah ialah transformasi digital. BNI Syariah ingin jadi pemimpin pada aspek digital banking di industri perbankan syariah di Indonesia. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, tidak hanya meningkatkan kapasitas sistem teknologi informasi, BNI Syariah juga membentuk dua Divisi baru, yaitu Divisi *Digital Banking* dan Divisi *Transactional Banking*.

Pada akhir tahun 2018, jaringan usaha BNI syariah tersebar mencapai 3 kantor wilayah, 68 kantor cabang, 196 kantor cabang pembantu, 16 kantor kas, 23 mobil layanan gerak, dan 52 *payment point*. Tidak hanya itu, nasabah BNI Syariah juga bisa menggunakan jaringan

---

<sup>141</sup> Laporan Tahunan BJBS 2019, diakses pada tanggal 1 Juli, 2021. [www.bjbsyariah.co.id](http://www.bjbsyariah.co.id).



kantor cabang BNI konvensional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.<sup>142</sup>

## 5. Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut “Mandiri Syariah” atau “Bank) didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan “Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/23 tanggal 16 Juli 1955, dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1810 tanggal 6 Oktober 1955 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 1956, Tambahan No. 390”.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri “No. 22 tanggal 12 Desember 2017, dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.) menyetujui untuk melakukan penambahan modal saham disetor sebesar 100.000.000 lembar saham atau setara Rp500.000. Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0200755 tanggal 14 Desember 2017, Persetujuan OJK terkait tambahan setoran modal ini telah diterima sesuai dengan surat OJK No.S-07/PB.13/2018 pada tanggal 15 Januari 2018”.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jl. M. H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. “Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank dimiliki 129 kantor cabang, 389 kantor cabang pembantu, 53 kantor kas, 117 payment point dan 53 outlet

---

<sup>142</sup> Laporan Tahunan BNIS 2019, diakses pada tanggal 1 Juli, 2021. [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id).

kantor layanan gadai (tidak diaudit). Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang dilakukan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 24 tanggal 13 November 2019”.

Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang dilakukan sesuai dengan “Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 24 tanggal 13 November 2019”.<sup>143</sup>

## 6. Bank Mega Syariah

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), ialah “bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001”. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya. “Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah”.

Pada tahun 2013, buat terus menjadi memperkokoh posisi Bank Mega Syariah selaku salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, hingga bank

---

<sup>143</sup> Laporan Tahunan BSM 2019, diakses pada tanggal 1 Juli, 2021. [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id).

melaksanakan relokasi kantor pusat dari Tower Bank Mega ke Tower Mega Syariah.

Tidak hanya itu, semenjak tahun 2018 Bank Mega Syariah sebagaimana di kutip pada pelaporan tahunannya “Sudah ditunjuk selaku Bank Penerimaan, Bank Penempatan serta Bank Mitra Investasi oleh Tubuh Pengelola Keuangan Haji( BPKH). Serta berikutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah buat jadi salah satu Bank Likuiditas yang jadi partner BPKH sebagai penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia”.<sup>144</sup>

#### 7. **Bank Panin Dubai Syariah**

PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk atau Panin Dubai Syariah Bank (Perseroan) semula bernama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sesuai dengan akta berdirinya yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, notaris di Malang, yaitu “Akta Perseroan Bank Terbatas No. 12 tanggal 8 Januari 1972, perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut dimulai dengan nama PT Bank Bersaudara Djaja. Perubahan nama tersebut didasarkan pada Akta Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H., notaris di Malang. Kemudian, berdasarkan Akta Berita Acara No. 27 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., notaris di Surabaya, Perseroan kembali berganti nama menjadi PT. Bank Harfa. Kemudian, nama tersebut kembali mengalami perubahan menjadi PT. Bank Panin Syariah berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn., pengganti dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan tersebut sehubungan perubahan kegiatan usaha Perseroan dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan Syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam”.

---

<sup>144</sup> Laporan Tahunan Bank Mega Syariah 2019, diakses pada tanggal 1 Juli, 2021. [www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id).



Sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, nama PT Bank Panin Syariah selanjutnya berubah menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk berdasarkan “Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Pada 2016, nama PT Bank Panin Syariah, Tbk diubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, notaris di Jakarta. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0008935.AH.01.02. TAHUN 2016 tanggal 11 Mei 2016. Penetapan penggunaan izin usaha dengan nama baru Panin Dubai Syariah Bank telah diterima dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016”.

Semenjak memulai keberadaan di industri perbankan Syariah di Indonesia, Perseroan secara tidak berubah- ubah menampilkan kinerja serta perkembangan usaha yang baik. Sokongan penuh dari industri induk PT Bank Panin Tbk( PaninBank) selaku salah satu bank swasta terbanyak di antara 10( 10) bank swasta terbanyak yang lain di Indonesia, dan Dubai Islamic Bank PJSC yang ialah salah satu bank Islam terbanyak di dunia, sudah menolong berkembang kembang Perseroan. Tidak hanya itu, keyakinan nasabah yang memakai bermacam produk pembiayaan serta menaruh dananya kepada Perseroan pula ikut berkontribusi pada pertumbuhan peninggalan Perseroan yang pesat. Perseroan hendak terus berupaya serta berkomitmen buat melindungi keyakinan nasabah serta warga lewat pelayanan serta penawaran produk yang

cocok dengan prinsip-prinsip Syariah dan memenuhi kebutuhan nasabah.<sup>145</sup>

## 8. Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin yakni bank universal yang beroperasi memakai prinsip syariah. Perseroan sebelumnya bernama PT Bank Persyarikatan Indonesia yang melaksanakan usaha konvensional. Sebagaimana di kutip Laporan Tahunan BSB 2019 “Pada tahun 2009, melaksanakan penggabungan unit Usaha Syariah PT Bank Bukopin Tbk ke dalam PT Bank Syariah Bukopin disetujui oleh Bank Indonesia pengalihan hak dan kewajiban dilaksanakan bersamaan pada bertepatan pada 10 Juli 2009 dan telah dituangkan ke dalam akta pembelahan UUS PT Bank Bukopin Tbk”.

PT Bank Bukopin Tbk selaku induk perseroan memandang prospek perbankan syariah buat senantiasa bertumbuh pada masa mendatang. Mengenai tersebut didasarkan pada sebagian aspek antara lain kebanyakan penduduk muslim yang ialah potensial market, sokongan dari Majelis Ulama Indonesia, political will pemerintah dalam wujud regulasi serta kelembagaan, berkembangnya lembaga pembelajaran keuangan syariah, serta masuknya lembaga- lembaga keuangan syariah internasional. Hingga akhir Desember 2019, perseroan memiliki jaringan kantor ialah 1 kantor pusat serta operasional, 11 kantor cabang, 7 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 96 kantor layanan syariah, 6 unit mobil kas keliling, dan 33 mesin ATM BSB dengan jaringan Prima BCA.<sup>146</sup>

## 9. BCA Syariah

BCAS ialah hasil konversi dari akuisisi BCA di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang beroperasi sebagai bank konvensional. Akuisisi tersebut disahkan melalui “Akta Akuisisi No. 72

---

<sup>145</sup> Laporan Tahunan BPDS 2019, diakses pada tanggal 1 Juli, 2021. [www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)

<sup>146</sup> Laporan Tahunan BSB 2019, diakses pada tanggal 1 Juli, 2021. [www.syariahbukopin.co.id](http://www.syariahbukopin.co.id)

tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar (Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB) No. 49 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha, nama PT Bank UIB berubah menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama juga dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham BCAS sebesar 99,996% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan 0,004% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP. GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010”.

Dengan diperolehnya izin tersebut hingga pada bertepatan pada 5 April 2010 BCAS formal beroperasi selaku Bank Universal Syariah. BCAS muncul buat memenuhi kebutuhan nasabah hendak layanan syariah, khususnya para nasabah BCA yang mendambakan layanan perbankan syariah memenuhi bermacam produk unggulan BCA yang sudah terdapat. Salah satu wujud nyata sokongan BCA kepada BCAS merupakan penyediaan layanan leluasa bayaran serta terintegrasi guna menunjang kemudahan akses nasabah BCAS. Layanan tersebut meliputi: “ Penyetoran uang tunai ke rekening BCAS melalui teller di seluruh cabang BCA yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia; • Cek saldo, pengiriman uang antara BCA-BCAS dan tarik tunai di seluruh jaringan ATM BCA; dan • Berbelanja di berbagai merchant yang menyediakan mesin EDC (Electronic Data Capture) BCA dengan menggunakan kartu debit BCAS; • Layanan Call Center melalui Halo BCA 1500888 Hingga akhir tahun 2019, BCAS telah melayani 87.843 nasabah pendanaan dan 14.095 nasabah pembiayaan melalui 67

jaringan cabang yang terdiri dari 13 Kantor Cabang (KC), 14 Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan 40 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Kudus, Palembang, Medan dan Banda Aceh”.<sup>147</sup>

#### **10. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah**

Sejak masih menjadi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (saat ini bernama “PT Bank BTPN Tbk”) di 2010, BTPN Syariah Laporan Tahunan BTPN Syariah “Telah merangkul dan menjangkau segmen yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan, yaitu segmen prasejahtera produktif. Sesuai amanah untuk memberikan kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan di segmen ini, BTPN Syariah pun memberikan akses, layanan serta produk perbankan sesuai prinsip syariah sehingga mereka dapat memantapkan niat untuk mewujudkan impian meraih kehidupan yang lebih baik”.

Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia melalui pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (saat ini bernama “PT Bank BTPN Tbk”) dan proses konversi PT Bank Sahabat Purna Danarta (“BSPD”).

Selaku salah satunya bank universal syariah di Indonesia yang fokus membagikan pelayanan untuk pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif serta meningkatkan keuangan inklusif, BTPN Syariah tetap berupaya menaikkan nilai dan mengganti kehidupan tiap yang dilayaninya, tidak hanya dari menciptakan kinerja keuangan yang baik. Oleh sebab itu, produk serta layanan untuk nasabah BTPN Syariah terus ditingkatkan serta dibesarkan. Dengan demikian, BTPN Syariah bisa terus

---

<sup>147</sup> Laporan Tahunan BCAS 2019, diakses pada tanggal 1 Juli, 2021. [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id).

membagikan akibat positif untuk jutaan warga di Indonesia serta mewujudkan Rahmatan Lil Alamin.<sup>148</sup>

### 11. Maybank Syariah Indonesia

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari Grup Malayan Banking Berhad (Maybank) sebagai salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, PT Bank Maybank Indonesia Tbk bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989. Pada tahun 2008, Maybank mengakuisisi BII melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya yaitu Maybank Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn. Bhd. (MOCS) dan Sorak Financial Holdings Pte. Ltd. (Sorak).

Kemudian, melalui hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, “PT Bank Internasional Indonesia Tbk tanggal 24 Agustus 2015, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU0941203. AH.01.02 tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015, dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/KDK.03/2015 tanggal 23 September 2015, BII berubah nama menjadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia), mengukuhkan identitasnya sebagai entitas utuh yang tidak terpisahkan dari Grup Maybank serta senantiasa berusaha untuk menghadirkan Humanising Financial Services kepada semua pemangku kepentingan. Maybank Indonesia menyediakan serangkaian produk dan jasa komprehensif bagi nasabah individu maupun korporasi melalui layanan Community Financial Services (Perbankan Ritel dan Perbankan Non-Ritel) dan

---

<sup>148</sup> Laporan Tahunan BTPN Syariah, diakses pada tanggal 1 Juli, 2021. [www.btpnsyariah.co.id](http://www.btpnsyariah.co.id).



Perbankan Global, serta pembiayaan otomotif melalui entitas anak yaitu WOM Finance untuk kendaraan roda dua dan Maybank Finance untuk kendaraan roda empat. Maybank Indonesia juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas digital banking melalui Mobile Banking, Internet Banking, M2U (mobile banking berbasis internet banking) dan berbagai saluran lainnya. Pada akhir tahun 2019, Maybank Indonesia telah memiliki 374 cabang termasuk cabang Syariah yang tersebar di Indonesia serta satu cabang luar negeri (Mumbai, India)<sup>149</sup>.

Di samping itu, Maybank Indonesia juga memiliki sebanyak 21 Mobil Kas Keliling dan 1.571 ATM termasuk CDM (Cash Deposit Machine) yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM tergabung dalam jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura, Malaysia dan Brunei. Hingga periode 31 Desember 2019, Maybank Indonesia mengelola simpanan nasabah sebesar Rp110,6 triliun dan memiliki total aset senilai Rp169,1 triliun.<sup>149</sup>

## **B. Analisis Data**

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Informasi riset yang sudah dikumpulkan berikutnya diolah serta dianalisis dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan dalam riset ini bertujuan buat mendeskripsikan ilustrasi yang diteliti dengan memandang nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari tiap- tiap informasi variabel. Pengujian statistik memakai SPSS 16 dengan jumlah 41 informasi riset dari variabel- variabel yang digunakan ialah: dewan komisaris, dewan pengawas syariah, komite audit, leverage memakai DAR serta pengungkapan islamic social reporting (ISR). Berikut hasil pengujian statistik deskriptif yang sudah dicoba oleh periset.

---

<sup>149</sup> Laporan Tahunan Maybank Syariah, diakses pada tanggal 1 Juli, 2021. [www.maybanksyariah.co.id](http://www.maybanksyariah.co.id)

**Tabel 4.2.**  
**Descriptive Statistics**

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
X1Dewan Komisaris	41	3,00	8,00	4,0731	1,12673
X2Dewan Pengawas Syariah	41	2,00	5,00	2,3415	0,61684
X3Komite Audit	41	1,00	7,00	3,8049	1,24939
X4Leverage	41	0,01	0,97	0,4955	0,34931
Yisr	41	0,5	0,85	0,7252	0,08957
Valid N (listwise)	41				

Sumber: hasil olah peneliti

Berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif dapat dilihat bahwa sampel penelitian berjumlah 41, terlihat mengenai statistik skor untuk dewan komisaris memiliki nilai *minimum* sebesar 3,00 sedangkan nilai *maximum* sebesar 8,00. Dewan komisaris menunjukkan nilai *mean* sebesar 4,0731 dengan standar deviasi sebesar 1,12673.

Untuk variabel dewan pengawas syariah menunjukkan bahwa nilai *minimum* sebesar 2,00, *maximum* sebesar 5,00, nilai *mean* sebesar 2,3415 dengan standar deviasi sebesar 0,61684.

Untuk variabel komite audit menunjukkan bahwa nilai *minimum* sebesar 1,00, *maximum* sebesar 7,00, nilai *mean* sebesar 3,8049 dengan standar deviasi sebesar 1,24939.

Untuk variabel leverage yang dihitung menggunakan DAR menunjukkan bahwa nilai *minimum* sebesar 0,01, *maximum* sebesar 0,97, nilai *mean* sebesar 0,4955 dengan standar deviasi sebesar 0,34931.

Untuk variabel pengungkapan *islamic social reporting* (isr) menunjukkan bahwa nilai *minimum* sebesar 0,5, *maximum* sebesar 0,85, nilai *mean* sebesar 0,7252 dengan standar deviasi sebesar 0,08957.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas serta autokorelasi. Berikut penjelasan

dari hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan oleh peneliti:

**a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik ialah yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian dengan cara uji *kolmogorov-smirnov*. Apabila residual memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan data penelitian tersebut berdistribusi normal.<sup>150</sup> Pada waktu pengujian normalitas data awalnya terdapat masalah normalitas dalam penelitian ini. Sehingga dilakukan uji outlier terlebih dahulu, berdasarkan uji outlier tersebut ditemukan 7 sampel yang mempunyai data outlier. Oleh sebab itu pada penelitian ini dilakukan penghapusan data outlier agar data menjadi normal. Pada akhirnya jumlah sampel pada penelitian ini menjadi 41 ( $48-7=41$ ). Selanjutnya dilakukan uji normalitas, dimana hasil uji normalitas terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3.**  
**Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov**

	Hasil Pengujian	Keterangan
Test Statistic	0,718	Data terdistribusi normal
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,681	Data terdistribusi normal

*Sumber: hasil olah peneliti*

Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas menunjukkan nilai *test statistic kolmogorov-smirnov* sebesar 0,718 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,681 yang berada diatas 0,05. Dengan demikian uji

<sup>150</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*, 112.

normalitas menunjukkan data penelitian berdistribusi secara normal.

**b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Adanya multikolinieritas apabila nilai *Tolerance* menunjukkan  $< 0,10$  dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $> 10$ . Berikut hasil uji multikolinieritas yang telah dilakukan oleh peneliti.

**Tabel 4.4.**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Dewan Komisaris	0,842	1,188	Non Multikolinieritas
Dewan Pengawas Syariah	0,774	1,293	Non Multikolinieritas
Komite Audit	0,916	1,092	Non Multikolinieritas
Leverage	0,898	1,114	Non Multikolinieritas

*Sumber: hasil olah peneliti*

Dari tabel diatas, hasil uji multikolinieritas diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10. Variabel dewan komisaris sebesar 1,188, variabel dewan pengawas syariah sebesar 1,293, variabel komite audit sebesar 1,092 dan variabel leverage sebesar 1,114. Selain melihat nilai VIF, nilai *tolerance* juga dapat menunjukkan tidak adanya multikolinieritas antar variabel variabel independen dalam model regresi. Dimana dari masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10, yaitu variabel dewan komisaris sebesar 0,842, variabel dewan pengawas syariah sebesar 0,774, variabel komite audit sebesar 0,916 dan variabel leverage sebesar 0,898 Sehingga dapat disimpulkan

bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam pengujian heteroskedastisitas ini menggunakan uji gletser yang mana tidak terjadinya heterokedastisitas apabila nilai signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (0,05).<sup>151</sup>

**Tabel 4.5.**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**  
**Uji Glejser**

Variabel	Sig.	Keterangan
Dewan Komisaris	0,476	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Dewan Pengawas Syariah	0,904	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Komite Audit	0,113	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Leverage	0,798	Tidak terjadi Heterokedastisitas

*Sumber: hasil olah peneliti*

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji heterokedastisitas diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Variabel dewan komisaris sebesar 0,476, variabel dewan pengawas syariah sebesar 0,904, variabel komite audit sebesar 0,113 dan variabel leverage sebesar 0,798. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik

<sup>151</sup> Imam Ghozali, *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 19, 143.



adalah regresi yang bebas dari autokolerasi.<sup>152</sup> Pada penelitian ini pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW test). Autokorelasi tidak terjadi apabila nilai Durbin Watson (DW) lebih besar dari nilai dU dan lebih kecil dari 4-dU sesuai tabel Durbin Watson (sesuai jumlah sampel dan tingkat signifikansi yang telah ditentukan). Hasil uji autokorelasi dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.6.**  
**Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson**

Durbin-Watson	dU	DW	4-dU
1,740	1,8029	1,740	2,2165

*Sumber: hasil olah peneliti*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,740, nilai dU sebesar 1,8029. Sehingga didapat nilai 4-dU sebesar 2,2165. Hal ini memiliki arti bahwa nilai DW lebih kecil dari nilai dU dan 4-dU. Hal ini memiliki arti bahwa pada model regresi terjadi gejala autokorelasi karena nilai DW 1,740 lebih kecil dari dU1,8029 dan kurang dari 4-Du. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan pengobatan autokorelasi dengan metode Cochrane-Orcutt.

**Tabel 4.7.**  
**Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson**  
**Cochrane-Orcutt**

Durbin-Watson	dU	DW	4-dU
1,957	1,8029	1,957	2,2165

*Sumber: hasil olah peneliti*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,957, nilai dU sebesar 1,8029. Sehingga didapat nilai 4-dU sebesar 2,2165. Hal ini memiliki arti bahwa pada model regresi tidak terjadi

<sup>152</sup> Imam Ghozali, *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 19, 105–139.

gejala autokorelasi karena nilai DW 1,957 lebih besar dari dU 1,8029 dan kurang dari 4-dU.

### 3. Hasil Uji Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien determinasi  $R^2$  dan regresi linier berganda serta pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Hasil analisis data dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.8.**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Pengujian Hipotesis	Hasil Pengujian
<b>Uji Koefisien Determinasi</b> (Adjusted $R^2$ )	0,222
<b>Uji Signifikansi Simultan F</b>	
F	3,845
Sig.	0,011
<b>Uji Signifikansi Parsial (Uji t)</b>	
t/Sig	Dewan Komisaris - 0,724/0,474
	Dewan Pengawas Syariah - 2,365/0,024
	Komite Audit -1,079/0,288
	Leverage 1,100/0,279
<b>Koefisien Regresi</b>	Konstanta 0,911
	Dewan Komisaris -0,09
	Dewan Pengawas Syariah - 0,054
	Komite Audit -0,011
	Leverage 0,042

*Sumber: hasil olah peneliti*

#### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Berdasarkan tabel diatas nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,222 atau 22,2%. Nilai tersebut mengandung arti bahwa besarnya peran atau kontribusi variabel dewan komisaris, dewan pengawas syariah, komite audit serta leverage terhadap pengungkapan isr adalah sebesar 22,2%. Sedangkan sisanya 77, 8% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar penelitian ini.

**b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.<sup>153</sup> Uji simultan ini dalam hasil perhitungan ditunjukkan dengan F hitung. Berdasarkan tabel uji diatas menunjukkan F hitung sebesar 3,845 dan nilai *p value* (sig) sebesar 0,011. Sedangkan F tabel dengan taraf  $\alpha = 0, 05$  adalah sebesar 2,48. Hal ini berarti nilai F hitung lebih tinggi dari F tabel dan nilai nilai *p value* (Sig) yang berada di bawah 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu dewan komisaris, dewan pengawas syariah, komite audit dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pengungkapan isr Bank Umum Syariah di Indonesia.

**c. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji parsial ini dalam hasil perhitungan statistik ditunjukkan dengan t hitung.

$H_0$  : Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_a$  : Variabel independen secara parsial mempengaruhi signifikan terhadap.

**1) Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Perbankan Syariah**

Variabel independen Dewan Komisaris mempunyai thitung sebesar- 0, 724 dengan

---

<sup>153</sup> Imam Ghozali, *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 19, 97–98.

tingkatan signifikansi sebesar 0,474 yang mana signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 serta  $t_{hitung} |-0,724| < t_{tabel} |1,688$ . Hal ini bahwa  $H_{a1}$  ditolak, sedangkan  $H_{01}$  diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan jika Dewan Komisaris tidak mempengaruhi signifikan terhadap pengungkapan ISR.

**2) Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Perbankan Syariah**

Variabel independen Dewan Pengawas Syariah memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -2,365 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,024 yang mana signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan  $t_{hitung} |-2,365| < t_{tabel} |1,688$ . Hal ini bahwa  $H_{a2}$  diterima, sedangkan  $H_{02}$  ditolak. Dari hasil tersebut bisa disimpulkan kalau Dewan Pengawas Syariah mempengaruhi signifikan terhadap pengungkapan ISR..

**3) Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Perbankan Syariah**

Variabel independen Komite Audit memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -1,079 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,288 yang mana signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 dan  $t_{hitung} |-1,079| < t_{tabel} |1,688$ . Hal ini bahwa  $H_{a3}$  ditolak, sebaliknya  $H_{03}$  diterima. Dari hasil tersebut bisa disimpulkan kalau Komite Audit tidak mempengaruhi signifikan terhadap pengungkapan ISR..

**4) Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Perbankan Syariah**

Variabel independen Leverage memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 1.100 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,279 yang mana signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 dan  $t_{hitung} |1.100| < t_{tabel} |1,688$ . Hal ini bahwa  $H_{a4}$  ditolak, sebaliknya  $H_{04}$  diterima. Dari hasil tersebut bisa disimpulkan kalau Leverage tidak mempengaruhi signifikan terhadap pengungkapan ISR..

#### d. Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah diketahui uji parsial (uji t), maka bentuk persamaan regresi berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 0,911 + (-0,009)X_1 + (-0,054)X_2 + (-0,011)X_3 + 0,42X_4 + e$$

#### Keterangan:

Y = pengungkapan isr

a = konstanta

$b_1b_2b_3b_4$  = koefisien regresi

$X_1$  = dewan komisaris

$X_2$  = dewan pengawas syariah

$X_3$  = komite audit

$X_4$  = leverage

e = standar kesalahan

Persamaan regresi berganda diatas dapat diartikan bahwa variabel leverage mempunyai pengaruh paling besar terhadap pengungkapan *islamic social reporting* (isr) yaitu sebesar 0,42% dibandingkan dengan variabel bebas lainnya. Kemudian variabel dewan pengawas syariah berpengaruh negatif yaitu sebesar -0,054% sehingga kurang berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* (isr). Disusul dengan variabel komite audit sebesar -0,011% dan dewan komisaris sebesar -0,009%.

Persamaan model regresi tersebut bisa dipaparkan selaku berikut :

- 1) Konstanta diperoleh sebesar 0, 911 yang berarti bila variabel dewan komisaris, dewan pengawas syariah, komite audit serta leverage sama dengan nol( 0) hingga pengungkapan Islamic Social Reporting( ISR) terletak pada angka 0, 911.
- 2) Koefisien regresi dimensi dewan komisaris sebesar- 0, 009 serta bertanda negatif. Perihal ini berarti tiap peningkatan satu persen dimensi dewan komisaris dengan anggapan variabel yang lain senantiasa, hingga pengungkapan ISR hadapi penyusutan sebesar 0, 009.



- 3) Koefisien regresi dimensi dewan pengawas syariah sebesar - 0,054 serta bertanda negatif. Perihal ini berarti tiap peningkatan satu persen dimensi dewan pengawas syariah dengan anggapan variabel yang lain senantiasa, hingga pengungkapan ISR hadapi penyusutan sebesar 0,054.
- 4) Koefisien regresi dimensi komite audit sebesar - 0,011 serta bertanda negatif. Perihal ini berarti tiap peningkatan satu persen dimensi komite audit dengan anggapan variabel yang lain senantiasa, hingga pengungkapan ISR hadapi penyusutan sebesar 0,011.
- 5) Koefisien regresi leverage sebesar 0,42 serta bertanda positif. Perihal ini berarti tiap peningkatan satu persen leverage dengan anggapan variabel yang lain senantiasa, hingga pengungkapan ISR hadapi kenaikan sebesar 0,42.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Riset ini bertujuan buat penujian pengaruh dewan komisaris, dewan pegawai syariah, komite audit serta leverage terhadap pengungkapan islamic social reporting( ISR). Bersumber pada hasil analisis hingga pembahasan tentang hasil riset merupakan selaku berikut:

#### 1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)

Variabel dimensi dewan komisaris ialah variabel yang mempengaruhi negatif serta tidak signifikan terhadap pengungkapan isr. Perihal tersebut didukung oleh hasil uji t yang menciptakan nilai thitung dari variabel dewan komisaris sebesar - 0,724 sehingga lebih kecil dari t tabel sebesar 1,688 serta tingkatan signifikannya( Sig) sebesar 0,474 yang terletak diatas 0,05. Ini menampilkan kalau hipotesis alternatif( 1) tidak bisa diterima( ditolak) serta hipotesis (0) diterima.

Hasil riset ini menampilkan kalau tidak terdapatnya pengaruh tersebut bisa terjalin sebab dewan komisaris tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap urusan pengoperasian industri serta penerapan tata kelola industri. Data yang tidak menguntungkan

cenderung tidak dilaporkan oleh industri, sebab dikira selaku bad news untuk publik yang hendak pengaruhi keputusan mereka dalam berinvestasi.<sup>154</sup>

Hasil riset ini sejalan dengan riset Enggaryanti&Ardini pada tahun 2018<sup>155</sup> serta Baidok&Septiarini pada tahun 2016 melaporkan kalau secara parsial dewan komisaris tidak mempengaruhi terhadap isr. Bisa diakibatkan sebab dalam melaksanakan tugas dewan komisaris tidak senantiasa menetap, cenderung pasif serta tidak bisa memantau secara langsung sehingga kurang menunjang berlangsungnya pengungkapan Islamic Social Reporting( ISR) dalam bank universal syariah.<sup>156</sup>

## **2. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)**

Variabel dimensi dewan pegawai syariah ialah variabel yang mempengaruhi negatif serta signifikan terhadap pengungkapan isr. Perihal tersebut didukung oleh hasil uji t yang menciptakan nilai t hitung dari variabel dewan pengawas syariah sebesar- 2, 365 sehingga lebih kecil dari t tabel sebesar 1, 688 serta tingkatan signifikannya( Sig) sebesar 0, 024 yang terletak dibawah 0, 05. Ini menampilkan kalau hipotesis alternatif( 2) tidak bisa diterima( ditolak) serta hipotesis( 0) diterima.

Hasil riset ini sejalan dengan Lailiyah pada tahun 2021 melaporkan kalau dewan pengawas syariah mempengaruhi negatif terhadap pengungkapan ISR. Apabila dewan pengawas syariah terjalin penyusutan, pengungkapan ISR hendak hadapi kenaikan. Begitu pula

---

<sup>154</sup> Nindya Tyas Hasanah et al., “Analisis Pengaruh Gcg Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR),” *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*5, No.2, 2017, 119.

<sup>155</sup>

<sup>156</sup> Baidok dan Septiarini, “Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah dan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah periode 2010-2014,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*3, No.12, 2016.

kebalikannya. Sebab tidak seluruh dewan pengawas syariah di tiap bank berfungsi pada pengungkapan ISR. Mekanisme kerja dps tidak terpaut langsung dengan keputusan manajemen.<sup>157</sup>

Riset yang dicoba oleh Inuzula et al pada tahun 2015 melaporkan kalau tidak berperannya dewan pengawas syariah dalam pengungkapan ISR disebabkan tidak mempunyai keterkaitan secara langsung dalam laporan pengungkapan ISR, tetapi keterlibatan dps dalam pengungkapan ISR bisa dilihat secara jelas dalam “PBI No.Kep-98/MUI/III/2001” mekanisme kerja dps cuma terbatas kepada kesesuaian label serta produk ataupun hendak yang berlandaskan dengan sistem syariah. Perihal ini nampak jelas kalau cakupan kedudukan dps sangat terbatas dalam pengungkapan ISR, sementara itu dps itu ialah perpanjangan tangan dari DSN- MUI dalam tiap- tiap institusi syariah, sepatutnya andil daripada dps lumayan besar mulai dari operasional institusi syariah samapi kepada kebijakan yang menyangkut dengan metode institusi syariah baik dimata warga ataupun DSN MUI.<sup>158</sup>

### **3. Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)**

Variabel komite audit ialah variabel yang mempengaruhi negatif serta tidak signifikan terhadap pengungkapan isr. Perihal tersebut didukung oleh hasil uji t yang menciptakan nilai t hitung dari variabel dewan komisaris sebesar- 1, 079 sehingga lebih kecil dari t tabel sebesar 1, 688 serta tingkatan signifikannya( Sig) sebesar 0, 288 yang terletak diatas 0, 05. Ini menampilkan kalau hipotesis alternatif( 3) tidak bisa diterima( ditolak) serta hipotesis( 0) diterima.

---

<sup>157</sup> Khasanatul Lailiyah et al., “Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting,” *E-JRA10*, No.5, 2021, 64-65.

<sup>158</sup> Lakharis Inuzula et al., “Peran Dewan Pengawas Syariah Dan Dewan Komisaris Dalam Mengungkapkan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Magister Akuntansi4*, No,4, 2015, 75.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ganis pada tahun 2020<sup>159</sup> serta Kurniawati&Yaya pada tahun 2017 kalau variabel komite audit tidak mempengaruhi terhadap pengungkapan ISR. Perihal tersebut berarti kalau besar kecilnya dimensi komite audit yang terdapat di industri tidak mempengaruhi mutu pengungkapan data industri. Komite audit mempunyai tanggungjawab dalam 3 bidang, ialah dalam laporan keuangan, tata kelola industri serta pengawasan industri. Tidak berpengaruhnya komite audit terhadap pengungkapan ISR mungkin sebab komite audit lebih melaksanakan tanggung jawab dalam bidang tata kelola industri dan tanggung jawab di bidang laporan keuangan daripada tanggung jawab dalam pengungkapan data sosial, sehingga jumlah komite audit tidak menjamin kalau penerapan pengawasan terhadap manajemen buat melaksanakan kecurangan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial hendak berjalan secara efisien.<sup>160</sup>

#### **4. Pengaruh Ukuran Leverage terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)**

Variabel leverage ialah variabel yang tidak mempengaruhi serta tidak signifikan terhadap pengungkapan isr. Perihal tersebut didukung oleh hasil uji t yang menciptakan nilai t hitung dari variabel dewan komisaris sebesar 1, 100 sehingga lebih kecil dari t tabel sebesar 1, 688 serta tingkatan signifikannya( Sig) sebesar 0, 279 yang terletak diatas 0, 05. Ini menampilkan kalau hipotesis alternatif( 4) tidak bisa diterima( ditolak) serta hipotesis( 0) diterima.

Hasil riset ini menampilkan kalau tidak mempengaruhi terhadap pengungkapan yang lain yang

---

<sup>159</sup> Ganis Bina Desy Ariyani, “Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening,,” (Skripsi Iain Salatiga, 2020), 109.

<sup>160</sup> Mahardhika Kurniawati dan Rizal Yaya, “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting,” *Jurnal Akuntansi dan Investasi*18, No.2, 2017, 169.

bukan cuma bersumber dari laporan tahunan industri. Data serta pengungkapan yang lain bisa diperoleh kreditur lewat laporan interim yang disediakan oleh industri, perjanjian ataupun tanya jawab secara langsung dengan pihak manajemen industri. Kreditur tidak sangat menuntut industri buat melaksanakan pengungkapan *Islamic social reporting* secara luas sebab masih bergantungnya kreditur pada sumber data tidak hanya laporan tahunan industri. Terus menjadi besar leverage sesuatu industri, besar mungkin industri tersebut hendak melanggar kontrak hutangnya dengan metode memberi tahu laba di masa saat ini lebih besar dibanding dengan laba pada periode berikutnya. Tingginya laba yang dilaporkan tersebut menimbulkan manajer wajib mengursngi biaya- biaya yang terdapat, antara lain bayaran terpaut pengungkapan tanggung jawab sosial industri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasanah et al., pada tahun 2017<sup>161</sup> dan Aning pada tahun 2021<sup>162</sup> yang menampilkan kalau variabel leverage tidak mempengaruhi signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*. Bersumber pada riset yang dicoba Rostiani& Sukanta pada tahun 2018<sup>163</sup> dan Rosiana et al., pada tahun 2015 yang menampilkan tidak terdapat ikatan antara leverage dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.<sup>164</sup>

---

<sup>161</sup> Nindya Tyas Hasanah et al., “Analisis Pengaruh Gcg Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR),” *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*5, No.2, 2017, 119.

<sup>162</sup> Aning Yusrina Hanifah, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris dan ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 0.

<sup>163</sup> Siti Sara Rostiani dan Tuntun A. Sukanta, “Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR),” *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*4, No.2, 2018.

<sup>164</sup> Rita Rosiana et al., “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan *Islamic Governance Score* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*5, No.1, 2015.